



JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaemb>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



ANALISIS HUBUNGAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Stephanus Eri Kusuma^a

^a Fakultas Ekonomi/ Jurusan Ekonomi, email.steriks@usd.ac.id, Universitas Sanata Dharma

ABSTRACT

This study aims to analyse the relationship between grants and social assistance distributed by the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta and the income of people in the region. In this study, the indicators of grants and social assistance used are (1) the total value of grants and social assistance delivered in all forms, (2) the value of grants and social assistance delivered in the form of money, and (3) the value of grants and social assistance delivered in the form of goods and services. Meanwhile, the community income indicator used is the per capita income of the people in Yogyakarta at 2010 constant prices. This research examines the phenomenon of grants and social assistance of the Special Region of Yogyakarta in 2017-2021. The data is obtained directly from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD DIY) and data from the Central Statistics Agency for the Special Region of Yogyakarta Province. Data processing utilizes statistical program SPSS 26 to provide correlation analysis and is supported by the utilization of Microsoft Office Excel to provide graphical analysis. The results of the analysis indicate that, statistically, there is a strong, positive and significant relationship between grants (especially grants in total and grants in the form of money) and per capita income of the people of DIY. Meanwhile, statistically, there is no significant relationship between social assistance and per capita income of the people of DIY.

Keywords: grants, social assistance, regional government, people's income

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hibah dan bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Dalam penelitian ini, indikator hibah dan bansos yang digunakan adalah (1) nilai total hibah dan bantuan sosial yang disalurkan dalam seluruh bentuk (uang, barang, dan jasa), (2) nilai hibah dan bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang, dan (3) nilai hibah dan bantuan sosial yang disampaikan dalam bentuk barang dan jasa. Sedangkan indikator pendapatan masyarakat yang digunakan adalah pendapatan per kapita masyarakat Yogyakarta atas dasar harga konstan 2010. Penelitian ini mengkaji fenomena hibah dan bansos Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD DIY) dan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data memanfaatkan program statistik SPSS 26 untuk melakukan analisis korelasi serta Microsoft Office Excel untuk melakukan analisis grafis. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan antara hibah (khususnya hibah total dan hibah dalam bentuk uang) dengan pendapatan per kapita masyarakat DIY. Sementara itu, secara statistik tidak ada hubungan yang signifikan antara bansos dengan pendapatan per kapita masyarakat DIY.

Kata Kunci: hibah, bantuan sosial, pemerintah daerah, pendapatan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama negara Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, adalah terwujudnya suatu pemerintahan yang mampu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum terjadi jika terdapat struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua masyarakat memperoleh kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak, adil dan makmur [1]. Mengacu pada studi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kesejahteraan umum dapat ditunjukkan dengan akses masyarakat terhadap lapangan kerja, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (yang erat kaitannya dengan capaian dan distribusi pendapatan) masyarakat, tingkat kesehatan, dan kualitas pembangunan masyarakat.

Pasca desentralisasi di Indonesia, pemerintah di tingkat daerah memiliki kekuatan politik dan kewenangan pengalokasian anggaran publik yang semakin besar, termasuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya [2]. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah melalui penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara itu, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Mekanisme hibah dan bantuan sosial berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga memiliki sejumlah persoalan dalam prakteknya. Sejumlah studi menyatakan hibah dan bantuan sosial berpotensi memitigasi kondisi darurat [4]–[7]. Selain itu, hibah juga mendorong peningkatan partisipasi dan sinergitas lembaga lokal serta mendorong pengembangan usaha produktif (Pane & Ekwarso, 2011). Dua hal di atas membuat hibah dan bantuan sosial berpotensi membantu terpenuhinya prakondisi untuk penciptaan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa problematika yang disebutkan dalam pengelolaan hibah, diantaranya adalah (1) persoalan tata kelola dalam penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial, (2) kurangnya perhatian pada hibah dan bantuan sosial untuk pengembangan aktivitas produktif, (2) persoalan sosialisasi, penargetan dan penyaluran (khususnya terkait basis data, infrastruktur dan koordinasi), serta (4) potensi menimbulkan kecemburuan sosial. Berbagai hal tersebut dapat mengurangi efektivitas hibah dan bantuan sosial sebagai sarana yang memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat.

Data yang diperoleh dari *Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY* menunjukkan bahwa realisasi belanja hibah dan bantuan sosial cenderung mengalami *trend* peningkatan pada periode 2011-2021. Realisasi belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun 2011 adalah sebesar 132,4 milyar rupiah. dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi 790,6 miliar rupiah pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2017 hibah dan bantuan sosial, secara kumulatif, mengalami penurunan menjadi 632,6 miliar pada tahun 2017 dan cenderung terus meningkat kembali hingga pada puncaknya mencapai 901,0 miliar pada tahun 2021. *Trend* peningkatan hibah dan bantuan sosial di atas mengindikasikan bahwa hibah dan bantuan sosial masih menjadi alat fiskal pemerintah provinsi DIY untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Apakah *trend* peningkatan hibah dan bantuan sosial yang terus meningkat tersebut sudah mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di DIY dari waktu ke waktu? Pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk mengajukan pertanyaan penelitian: (1) Apakah hibah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhubungan dengan penciptaan pendapatan masyarakat pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2021? (2) Apakah bantuan sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhubungan dengan penciptaan pendapatan masyarakat pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Mekanisme hibah dan bantuan sosial berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak jarang masih terdapat sejumlah kelemahan dalam praktek implementasinya. Studi Pane & Ekwarso

(2011) menemukan bahwa hibah dari pemerintah daerah untuk pengembangan usaha ekonomi berperan dalam mendorong pengembangan usaha (melalui optimalisasi sumber daya lokal dan teknologi), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kemiskinan, serta sinergisitas antara lembaga publik lokal. Kehadiran bantuan sosial juga menjadi sarana yang membantu masyarakat dalam mengelola kondisi darurat, termasuk saat pandemi Covid-19 [4]–[7].

Dibalik potensinya, terdapat sejumlah titik lemah dan resiko sosial dari hibah dan bantuan sosial. Studi Gemiharto & Rosfiantika (2017) mengungkap sejumlah persoalan regulasi dan tata kelola dalam penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial, diantaranya: (1) ketiadaan pedoman penyusunan aturan pengelolaan, (2) ketidakjelasan kriteria dan pagu anggaran, (3) ketidakjelasan prosedur pengusulan dan penerimaan, (4) eksistensi objek penerima ganda dan ketidaklengkapan rincian informasi objek penerima, (5) ketiadaan standar laporan pertanggungjawaban, dan (6) ketiadaan unit kerja pemerintah yang melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan. Studi Khoiriyah et al. (2020) juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial bisa menimbulkan kecemburuan sosial karena ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Studi Barrientos (2019) di wilayah Asia-Pasifik mengkonfirmasi bahwa bantuan sosial mampu mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi masyarakat sasaran. Studi Barrientos (2019) juga mengungkap bahwa bantuan sosial cenderung berfokus pada ketercapaian standar hidup dasar dan kurang memperhatikan upaya untuk meningkatkan kapasitas produktif masyarakat sasaran. Selain itu, keterbatasan sosialisasi dan akses informasi kepada masyarakat sasaran serta berbagai problematika dalam penargetan dan penyaluran (basis data yang kurang lengkap dan tidak *real time*, infrastruktur penyaluran yang belum memadai, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penyalur bantuan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas bantuan sosial [10]–[13].

Studi Anggreni & Subanda (2020) menemukan fenomena nepotisme, lemahnya proses verifikasi, serta keterbatasan sumber daya manusia untuk menunjang pelaporan yang standar sebagai sejumlah persoalan dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial. Sebagai tambahan, studi Haliim (2020) menyatakan bahwa kebijakan dana hibah dan bantuan sosial dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki sejumlah celah yang kemudian dimanfaatkan oleh para birokrat serta elit politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas serta melakukan korupsi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian ini dimulai dengan (1) proses penentuan variabel, indikator, dan sumber data penelitian, (2) pengumpulan data dan (3) analisis data. Terkait dengan proses pertama, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah hibah, bantuan sosial, dan pendapatan masyarakat. Indikator yang menjadi representasi setiap variabel serta sumber untuk memperoleh data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian

Variabel	Indikator	Sumber data
Hibah	nilai hibah yang disalurkan pemerintah provinsi: (1) dalam berbagai bentuk secara total; (2) dalam bentuk uang; (3) dalam bentuk barang dan jasa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Bantuan sosial	nilai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah provinsi: (1) dalam berbagai bentuk secara total; (2) dalam bentuk uang; (3) dalam bentuk barang dan jasa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 2010	Badan Pusat Statistik Provinsi DIY (www.yogyakarta.bps.go.id)

Data sekunder hibah dan bantuan sosial dikumpulkan secara langsung dari BPKAD. Sementara itu data sekunder pendapatan terkait pendapatan masyarakat diperoleh secara tidak langsung dari website BPS. Data sekunder yang sudah terkumpul, selanjutnya, dianalisis. Analisis diawali dengan analisis pergerakan (*trend*) variabel yang diuji untuk memberikan gambaran perkembangan masing-masing variabel dari waktu ke waktu. Kemudian, analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi eksistensi hubungan antara hibah (bantuan sosial) dan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk data yang seluruh variabel terujinya memiliki distribusi normal, dilakukan uji korelasi Pearson. Sementara itu, untuk data yang salah satu variabel terujinya tidak terdistribusi normal, dilakukan uji korelasi Spearman. Hipotesis uji korelasi diuji pada tingkat error 5%. Hasil uji hipotesis akan menginformasikan signifikansi hubungan antara variabel yang diuji dalam penelitian ini. Sementara itu, terkait tingkat kekuatan hubungan (ketika hubungan terbukti signifikan), terdapat range kekuatan hubungan yang ditentukan berdasarkan nilai koefisien korelasi (0 - 0,30 bermakna korelasi lemah; 0,31 - 0,70 bermakna korelasi moderat; 0,71-1 bermakna korelasi kuat) [16].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

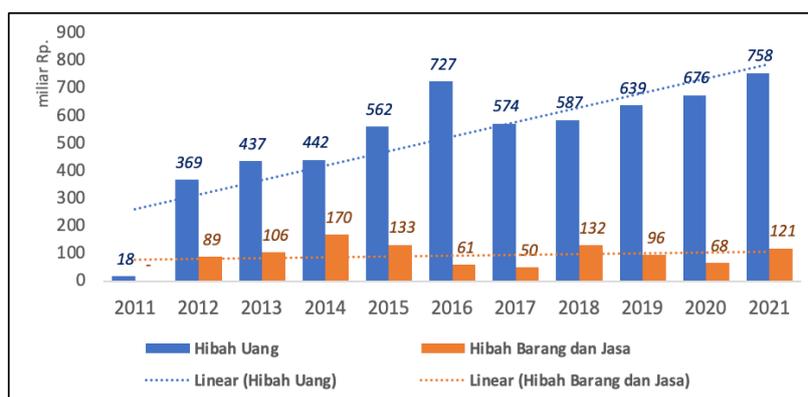
Hibah yang disalurkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun dan bantuan sosial cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu selama periode penelitian. Data menunjukkan bahwa hibah pada tahun 2011 hanya sebesar 17,6 miliar rupiah, lalu cenderung terus meningkat hingga 788,1 miliar rupiah pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 624,8 miliar rupiah pada tahun 2017. Meskipun demikian, setelah tahun 2017 hibah terus meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 878,4 miliar rupiah pada tahun 2021. Sementara itu, realisasi bantuan sosial yang disalurkan bergerak lebih fluktuatif dibandingkan hibah. Pada tahun 2011 sebesar 114,8 miliar rupiah, lalu berfluktuasi hingga mencapai titik terendahnya sebesar 2,6 miliar rupiah pada tahun 2016, kemudian pada periode setelahnya cenderung meningkat pada periode 2017-2019 dengan puncaknya sebesar 51,1 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021, saat masa pandemi, bantuan sosial yang disalurkan tidak cukup tinggi, yaitu 9,0 miliar rupiah pada tahun 2020 dan 22,6 miliar rupiah pada tahun 2021. Fluktuasi dalam penyaluran bantuan sosial mengindikasikan karakteristik bantuan sosial yang orientasinya adalah mengatasi kondisi darurat. Membandingkan data hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2011-2021, dapat bahwa belanja hibah jauh lebih mendominasi dibandingkan bantuan sosial.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Gambar 1. Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah DIY

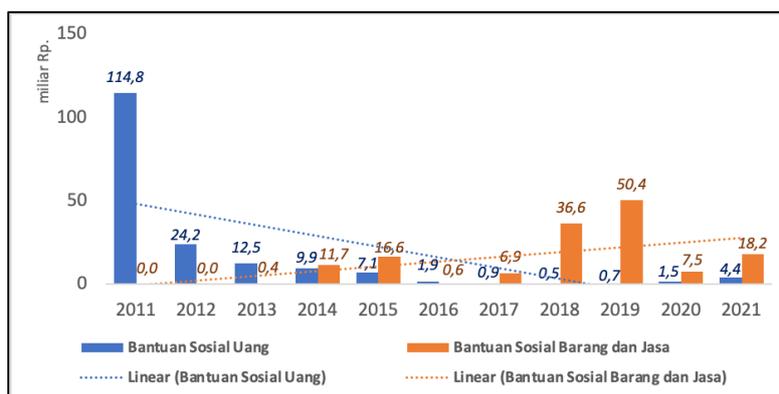
Hibah dan bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah DIY dapat berbentuk uang ataupun barang (jasa). Gambar di bawah ini menunjukkan secara rinci berapa banyak hibah dan bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang pada periode 2011-2021. Data yang diilustrasikan melalui gambar tersebut menunjukkan penyaluran hibah dalam bentuk uang lebih mendominasi dibandingkan hibah dalam bentuk barang (jasa) dari waktu ke waktu. Secara konsisten, pada periode 2011-2021, lebih dari 70 persen hibah disalurkan dalam bentuk uang. Tren pada tahun 2011-2021 menunjukkan, secara nominal, hibah dalam bentuk uang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara hibah dalam bentuk barang dan jasa relatif konstan.



Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)*

Gambar 2. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah DIY Menurut Bentuknya

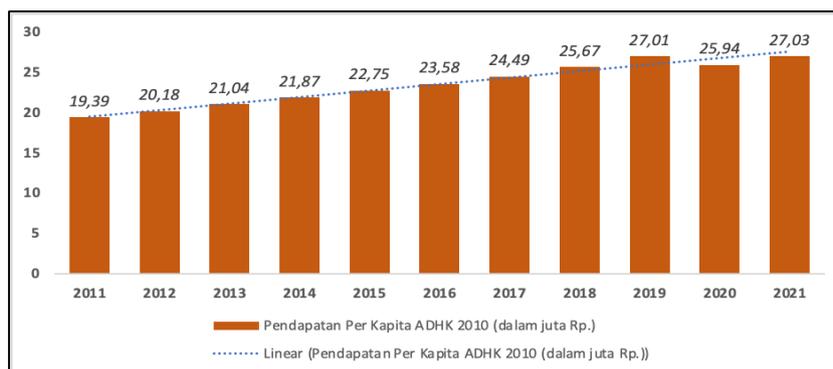
Berbeda dengan hibah, bentuk bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Daerah DIY menunjukkan perubahan tren. Pada periode 2011-2013, hibah dalam bentuk barang dan jasa sangat rendah proporsinya, bahkan pada tahun 2011 dan 2012 tidak terdapat bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang. Meskipun demikian sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, bantuan sosial cenderung lebih banyak disalurkan dalam bentuk barang (jasa). Pada tahun 2015-2021, proporsi bantuan yang disalurkan dalam bentuk barang (jasa) selalu di atas 80 persen. Secara tren nominal pada tahun 2011-2021, bantuan sosial dalam bentuk uang cenderung menurun, sementara bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa cenderung terus meningkat.



Sumber: *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)*

Gambar 3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah DIY Menurut Bentuknya

Berkaitan dengan pendapatan per kapita, pada tahun 2011-2021, pendapatan per kapita masyarakat DIY atas dasar harga konstan 2010 cenderung meningkat dari waktu ke waktu (meskipun sempat turun dan menjadi relatif lebih rendah pada masa pandemi, khususnya tahun 2020 dan 2021). Hal ini mengindikasikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat DIY yang semakin tinggi dari waktu ke waktu pada periode tersebut. Data menunjukkan bahwa, pada tahun 2011, pendapatan per kapita Provinsi DIY sebesar 19,39 juta rupiah per tahun. Kemudian, tingkat pendapatan per kapita terus meningkat dari waktu ke waktu dan mencapai posisi 27,01 juta rupiah pada tahun 2019. Meskipun demikian, pada tahun 2020, pendapatan per kapita turun menjadi 25,94 juta rupiah pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 27,03 juta rupiah pada tahun 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, www.yogyakarta.bps.go.id (diolah)

Gambar 3. Pendapatan Per Kapita DIY, 2011-2021 (dalam juta rupiah, atas dasar harga konstan 2010)

Hasil uji korelasi antara data hibah dan pendapatan per kapita masyarakat mengindikasikan adanya korelasi yang kuat, positif, dan signifikan antara hibah dalam bentuk uang dan hibah secara total terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (masing-masing dengan koefisien korelasi 0,79 dan 0,83). Hal ini mengindikasikan bahwa hibah, khususnya hibah dalam bentuk uang, dapat menjadi penggerak aktivitas penciptaan pendapatan masyarakat. Sementara itu, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hibah dalam bentuk barang dan jasa dengan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Meskipun demikian, jika mengamati hasil analisis *trend* pada bagian sebelumnya, tingkat kemiringan (*slope*) peningkatan hibah yang jauh lebih landai dibandingkan dengan trend peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Lebih rendahnya *slope* hibah dalam bentuk uang dibandingkan *slope* pendapatan per kapita tampaknya terkait dengan relative terbatasnya hibah yang disalurkan untuk pengembangan aktivitas produktif. Sebagai ilustrasi, dari total hibah dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah DIY pada periode 2011-2021 sebesar 5,8 triliun rupiah, sejumlah urusan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan penciptaan kapasitas produktif masyarakat (seperti pariwisata, pertanian, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kelautan dan perikanan, serta koperasi dan UKM) hanya mendapat alokasi sebesar 0,09 triliun rupiah atau 1,7 persen dari realisasi hibah dalam bentuk uang tunai. Hibah dalam bentuk uang lebih banyak disalurkan untuk urusan pendidikan yang dampak penciptaan pendapatannya relatif lebih jangka panjang. Sementara itu, tidak signifikannya hibah dalam bentuk barang dan jasa terhadap penciptaan pendapatan terjadi karena barang dan jasa yang disalurkan lebih didominasi untuk aktivitas pekerjaan umum, bukan untuk urusan pengembangan usaha produktif.

Tabel 2. Hasil uji korelasi

Variabel	PDRB Per Kapita	Intrepetasi hasil uji stat.
Hibah Total	0,799** (0,003)	Korelasi kuat, positif, dan signifikan
Hibah dalam Bentuk Uang	0,834** (0,001)	Korelasi kuat, positif, dan signifikan
Hibah dalam Bentuk Barang dan Jasa	0,231 (0,494)	Tidak ada korelasi
Bantuan Sosial Total	-0,155 (0,650)	Tidak ada korelasi
Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang	-0,818** (0,002)	Korelasi kuat, negatif, dan signifikan
Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang dan Jasa	0,688* (0,019)	Korelasi kuat, positif, dan signifikan

Keterangan:

*(signifikan pada level 5 persen) ** (signifikan pada level 1 persen)

Hasil uji korelasi antara data bantuan sosial dan pendapatan per kapita masyarakat mengindikasikan tidak adanya korelasi yang signifikan antara antara bantuan sosial secara total dan penciptaan pendapatan. Sementara itu, terdapat hubungan yang negatif, kuat, dan signifikan antara bantuan sosial dalam bentuk uang dan penciptaan pendapatan. Sementara itu, terdapat hubungan yang positif, moderat, dan signifikan antara

bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa terhadap penciptaan pendapatan per kapita. Tidak signifikannya hubungan antara bantuan sosial secara total dan penciptaan pendapatan menegaskan orientasi bantuan sosial yang memang tidak berorientasi untuk mendukung penciptaan pendapatan, namun lebih pada penanganan masalah sosial dan penanganan kondisi darurat. Sementara itu, signifikansi korelasi antara hibah dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang dan jasa dengan penciptaan pendapatan lebih terjadi karena adanya tren perubahan alokasi penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya dalam bentuk uang menjadi dalam bentuk barang dan jasa pada periode 2011-2021.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hibah jauh lebih mendominasi dibandingkan bantuan sosial dalam konteks belanja operasional Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, hibah memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, sementara bantuan sosial cenderung menurun dari waktu ke waktu. Realisasi hibah dalam bentuk uang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, sementara hibah dalam bentuk barang dan jasa relatif konstan. Hal tersebut berbeda dengan tren bantuan sosial dalam bentuk uang cenderung menurun, sementara bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa cenderung terus meningkat. Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat DIY cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu.

Hasil uji korelasi mengindikasikan bahwa, secara statistik, terdapat korelasi yang kuat, positif, dan signifikan antara hibah dalam bentuk uang dan hibah secara total terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya, peningkatan hibah cenderung diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita. Meskipun demikian, tingkat kenaikan pendapatan per kapita masyarakat tidak secepat tingkat kenaikan hibah. Hal ini ditengarai terjadi karena masih terbatasnya alokasi hibah yang ditujukan untuk pengembangan aktivitas (usaha) produktif yang berpotensi menghasilkan penciptaan pendapatan bagi masyarakat. Sementara itu, hasil uji korelasi antara bantuan sosial dan pendapatan per kapita masyarakat mengindikasikan bahwa, secara statistik, tidak terdapat korelasi yang antara antara bantuan sosial secara total dan penciptaan pendapatan. Hal ini terjadi karena tujuan dari bantuan sosial yang memang bukan untuk mendukung penciptaan pendapatan, namun lebih pada penanganan masalah sosial serta penanganan kondisi darurat dan rentan di masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan, jika ke depan, sasaran belanja hibah pemerintah daerah adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, perlu ada porsi pendanaan hibah yang lebih besar untuk peningkatan kapasitas produktif yang dapat mendorong penciptaan pendapatan secara berkelanjutan, seperti pariwisata, pertanian, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat dan desa melalui usaha kelompok, kelautan dan perikanan, serta koperasi dan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “Indikator Kesejahteraan,” *Referensi*, 2018.
- [2] A. Nasution, “Government Decentralization Program in Indonesia,” 601, 2016. [Online]. Available: <https://www.adb.org/publications/government-decentralization-program-indonesia/>
- [3] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- [4] N. Rulandari, A. Natsion, E. B. Esien, and A. P. Kesmawan, “The Policy Implementation Of Social Ministry’s Cash Assistance Program During The Covid-19 Pandemic In Jakarta,” *Journal of Governance and Public Policy*, vol. 9, no. 1, p. Layouting, Jan. 2022, doi: 10.18196/jgpp.v9i1.13113.
- [5] N. A. Sufiawan and N. Iryani, “Effectiveness Economic Welfare Through Bansos During Covid-19 in Payakumbuh City,” *JEJAK*, vol. 14, no. 2, pp. 218–234, Sep. 2021, doi: 10.15294/jejak.v14i2.27697.
- [6] N. Noerkaisar, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 2, no. 1, pp. 83–104, 2021.
- [7] F. Khoiriyah, L. Oktavia, N. Zakiyah, M. Afthon, and I. Huda, “The Effectiveness Of The Implementation Of Social Assistance On Communities Affected By Covid-19 In The Village Of Gedongarum Kanor District Bojonegoro District,” *Spirit Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 97–110, 2020.
- [8] R. H. Pane and H. Ekwarso, “Kinerja Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, vol. 2, no. 4, pp. 80–99, 2011.

- [9] I. Gemiharto and E. Rosfiantika, “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, vol. VII, no. 1, pp. 103–116, 2017.
- [10] A. Barrientos, “The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and The Pacific,” 62, 2019. [Online]. Available: www.adb.org
- [11] TNP2K, *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu: Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018.
- [12] F. B. Hirawan, “Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic,” 2020.
- [13] N. F. Wijayaningsih, E. P. Purnomo, A. T. Fathani, and L. Salsabila, “Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, vol. 24, no. 2, p. 98, Nov. 2021, doi: 10.31845/jwk.v24i2.706.
- [14] N. O. Anggreni and I. N. Subanda, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Dana Bantuan Sosial Masyarakat di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, vol. 4, no. 20, pp. 98–115, 2020.
- [15] W. Haliim, “Problematisasi Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit,” *Inovasi*, vol. 17, no. 1, pp. 39–53, May 2020, doi: 10.33626/inovasi.v17i1.136.
- [16] B. Ratner, “The correlation coefficient: Its values range between 1/1, or do they?,” *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing*, vol. 17, no. 2, pp. 139–142, Jun. 2009, doi: 10.1057/jt.2009.5.